

Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua

Thomas Bagus Putera Temaluru
Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
tbagusputera@gmail.com

Abstrak

Papua was an east region of Indonesian has a same ethnic Melanesia with Vanuatu. Vanuatu which a small state was very reactive and vocal to support freedom of Papua from Indonesia. Same of ethnic and human right violation at Papua be a reasons of Vanuatu to support Papuan freedom. Ethnic and human right has to be pondation of domestic politic of Vanuatu and at last to be a foreign policit orientation. Vanuatu has a dream which name Melanesia Renaissance which mean all of region of Melanesian has fulfilled our freedom and Vanuatu will be a leader about that dream.

Keywords: *Small State, Ethnic, Human Right, Melanesia Renaissance*

Papua merupakan wilayah Negara Republik Indonesia wilayah timur mempunyai kesamaan etnis Melanesia dengan Vanuatu. Vanuatu yang merupakan Negara kecil di kawasan Melanesia sangat reaktif dan vokal terhadap dukungan pemerdakaan Papua dari Indonesia. Alasan kesamaan etnis dan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua menjadikan Vanuatu sangat fokus dalam masalah ini. Kesamaan etnis dan HAM menjadi dasar utama dalam domestik politik Vanuatu yang akhirnya dibawa dalam ranah orientasi kebijakan luar negerinya. Vanuatu juga menjalankan mimpi dari kawasan Melanesia yang merupakan Melanesia Renaissance dimana seluruh kawasan Melanesia mendapat kemerdekaannya dan Vanuatu menjadi pemimpin terdepan dalam mengusung mimpi tersebut di kawasan Melanesia.

Kata Kunci: *Negara Kecil, Etnis, HAM, Melanesia Renaissance*

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia Timur. Namun wilayah tersebut sangat rawan konflik separatisme dalam rangka memisahkan diri dari Republik Indonesia. Keinginan Papua untuk lepas dari Republik Indonesia mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Vanuatu. Vanuatu merupakan salah satu negara dalam sub kawasan Melanesia di kawasan Pasifik Selatan. Vanuatu ditemukan oleh seorang pelaut berkebangsaan Portugis yang bernama Pedro Fernandes de Queiros pada tahun 1606. Kemudian disusul oleh pelaut Perancis yang bernama Lois Antoine de Bougainville pada 1768, dan disusul pelaut

berkebangsaan Inggris James Cook pada tahun 1774. Awalnya kepulauan ini bernama New Hebriden, kemudian berganti nama menjadi Vanuatu setelah mendapatkan kemerdekaannya.

Adanya kedekatan geografis dan etnis dalam Melanesia, penulis melihat suatu fenomena bahwa Vanuatu berani untuk memberi dukungan langsung terhadap pemerdakaan Papua. Vanuatu menyatakan bentuk dukungan terhadap Papua dengan memboikot misi "Melanesian Spearhead Group" (MSG) ke Indonesia pada 16 Januari 2014. Vanuatu melalui Edward Natapei sebagai menteri luar negeri menyatakan bahwa

akan bersedia menjadi delegasi untuk MSG jika mendapat kesempatan untuk bertemu dengan kelompok lokal, kelompok pro kemerdekaan, pemimpin gereja, dan kelompok lainnya yang punya perhatian terhadap masalah kekerasan hak asasi manusia di Papua. (News ABC 2014) Selain memboikot delegasinya di MSG supaya dapat bertemu dengan kelompok perwakilan pro kemerdekaan Papua, ada pula pernyataan resmi yang disampaikan melalui pidato Perdana Menteri Vanuatu Moana Kalosil dalam pertemuan internasional di Jenewa yang menyampaikan kondisi memperhatikan tentang Papua. Moana Kalosil menyatakan bahwa negaranya mengikuti pertemuan ini untuk mengingat kembali perhatiannya terhadap hak asasi manusia di Papua. Moana Kalosil menyampaikan pada Presiden konferensi di Jenewa bahwa ia sangat fokus terhadap perlakuan terhadap suara masyarakat Papua yang diabaikan di mata internasional, dimana hak asasi manusia telah ditindas dan ditekan sejak 1969. (Free West Papua 2014) Moana Kalosil meminta agar akses kepada ahli – ahli hak asasi manusia PBB, wartawan internasional dan lembaga sosial masyarakat internasional untuk mengunjungi Papua. Moana Kalosil mengangkat etnis Melanesia, dimana bangsa Melanesia di Papua telah menjadi korban perang dingin dan tumbal dalam perebutan sumber daya energi yang terdapat di Papua. Keberanian dan dukungan secara langsung oleh Vanuatu ini membuat penulis tertarik untuk menelusuri alasan yang mendasari Vanuatu serta upaya Vanuatu dalam mendukung lepasnya Papua dari Indonesia

Secara geografis Vanuatu merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah jauh lebih kecil daripada Pulau Ambon. Sejak Vanuatu beroleh kemerdekaan dari hibrida kolonial Inggris dan Perancis, sikap Vanuatu selalu reaktif dan radikal dalam mendukung wilayah Melanesia yang belum merdeka (salah satunya adalah Papua). Dalam setiap kesempatan di pertemuan internasional, Vanuatu

melalui Perdana Menteri selalu menyuarakan dukungan untuk pembebasan Papua. Beberapa Perdana Menteri yang menyatakan dukungannya langsung terhadap Papua adalah Moana C Kalosil, Joe Natuman, dan Edward Natapei. Dalam setiap pernyataan dukungan terhadap Papua selalu ditekankan pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua sejak 1960 yang telah memakan banyak korban jiwa.

Pernyataan Perdana Menteri Vanuatu Moana Kalosil ini menarik apabila kita melihat pada Papua yang memiliki kesamaan etnis dengan Vanuatu yaitu Melanesia. Kesamaan etnis ini memperlihatkan keterikatan antara Vanuatu dengan Papua dalam bentuk "Melanesia Connection" atau pun "Papua Connection". Bentuk – bentuk hubungan ini menarik, karena hubungan ini bisa menjadi salah satu alasan keberanian Vanuatu menghadapi Indonesia dalam dukungan kemerdekaan Papua.

Kedekatan etnis dan isu HAM membuat reaktifnya Vanuatu terhadap isu Papua. Hal ini menarik apabila ditelusuri konsistensi dari penggunaan isu ini berkaitan dengan kepentingan yang dibawa oleh Vanuatu melalui dukungan yang diberikan. Vokalnya Vanuatu perlu diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia untuk selalu siaga atas ancaman yang mengancam kedaulatannya.

Kepentingan Vanuatu dalam dukungan kemerdekaan Papua dipengaruhi oleh dua variabel yaitu domestik politik dan orientasi kekuatan. Domestik politik Vanuatu mencerminkan dari nilai – nilai lokal Vanuatu. Domestik politik dari Vanuatu punya hubungan dengan orientasi kebijakan luar negerinya yang disebut sebagai domestic influence. Domestik politik yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya dibagi dalam dua tahap yaitu level nasional dan level internasional. Pada level nasional, domestik grup mendorong kepentingannya dengan memaksa

pemerintahan untuk mengadopsi kebijakan yang diinginkan, dan para politisi mencari kekuatan untuk membangun koalisi terhadap grup lainnya. (Putnam, 434) Pada level internasional, pemerintahan nasional memaksimalkan kemampuannya dalam memenuhi tekanan domestiknya, sambil meminimalisir konsekuensi kerugian atas pengembangan asing. (Putnam, 434) Maka dukungan atas kemerdekaan Papua oleh Vanuatu merupakan bentuk kelanjutan dari domestik politik Vanuatu yang dibawa menjadi orientasi dalam kebijakan luar negerinya. Selain itu, orientasi kekuatan menjadi salah satu kepentingan Vanuatu yang melakukan Melanesia Renaissance.

Melanesia Renaissance yang mengangkat isu dekolonisasi menjadi fokus utama Vanuatu dalam mengupayakan kemerdekaan terhadap wilayah Melanesia yang belum merdeka. Hal ini menandakan adanya pemanfaatan isu HAM dan relasi negara – negara Melanesia dalam rangka memperoleh kekuatan yang strategis dari Vanuatu. Pemanfaatan isu yang digunakan oleh Vanuatu memancing reaktifnya sikap Vanuatu terhadap Indonesia terutama bila membahas Papua yang mana memiliki kedekatan etnis dengan Vanuatu yaitu Melanesia. Selain itu sikap reaktif ini dapat menjaring dukungan baik moral dan material dari publik regional dan internasional untuk mendukung pula upaya Vanuatu, termasuk juga dari Indonesia sebagai pihak tergugat oleh Vanuatu untuk memberikan respon langsung baik itu terhadap Papua maupun Vanuatu agar isu ini teredam oleh respon yang dilakukan oleh Indonesia terhadap upaya kemerdekaan Papua.

Dari teori – teori di atas menjelaskan bahwa kepentingan Vanuatu terhadap dukungan usaha kemerdekaan Papua terdapat dua kepentingan yang bisa membantu menjelaskan yaitu pertama dukungan yang diberikan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua merupakan bentuk

dari aliansi etnik antar etnik Melanesia. Kedekatan etnis menimbulkan hubungan emosional antara Vanuatu dengan Papua, terutama simpati yang diberikan Vanuatu terhadap masalah hak asasi manusia yang dialami Papua. Kedua, terdapat kaitan erat antara keinginan Vanuatu menjadi pemimpin regional negara – negara Melanesia dengan upaya mendukung kemerdekaan Papua. Keinginan menjadi pemimpin regional merupakan representasi domestik politik Vanuatu. Representasi ini merupakan kelanjutan dari usaha menegakkan Melanesia Renaissance. Dukungan diplomatik bagi kemerdekaan Papua melalui forum regional dan internasional adalah salah satu wujud dari upaya mewujudkan Melanesia Renaissance. Melanesia Renaissance merupakan ikatan yang memperkuat kohesivitas etnis dan hubungan emosional antara Vanuatu dengan Papua. Selain itu juga sikap reaktif yang ditunjukkan oleh Vanuatu merupakan bentuk upaya menarik perhatian dari regional dan internasional untuk turut membantu upaya yang sedang dilakukan oleh Vanuatu terhadap Papua.

Domestik politik Vanuatu menghubungkan antara Sosialisme Melanesia terhadap mekanisme domestik politiknya. Prinsip – prinsip seperti komunalisme, saling berbagi, kepedulian sesama yang diangkat oleh Melanesian Sosialisme ini banyak mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan. Nilai – nilai yang telah dijelaskan di atas banyak berperan dalam domestik politik Vanuatu sejak negara tersebut merdeka. Sosialisme Melanesia memerlukan perubahan sosial, ekonomi dan struktur politik secara radikal, kemudian memiliki tugas untuk memberi perubahan revolusioner secara cepat. (Premdas 1987)

Vanuatu merupakan negara hasil hibridisasi dari dua kolonial sebelumnya yaitu Perancis dan Inggris. Pengaruh dari Inggris dan Perancis sangat kuat dalam pemerintahan Vanuatu. Vanuatu mendapat kemerdekaannya pada tahun 1980. Dalam sistem politik awal

Vanuatu, terdapat dua partai yang mendominasi dalam perpolitikan awal Vanuatu yaitu New Hebrides National Party (NHNP, berganti nama menjadi Vanua'aku Pati-VP) dan Union Communautes des Nouvelles-Hebrides (MANH). Dengan Walter Lini dari Vanua'aku Pati (VP) sebagai Perdana Menteri pertama Vanuatu. Vanuatu mengikuti sistem politik republik dimana kepala negaranya hanya sebagai simbol dan lambang seremonial saja. Presiden dipilih setiap lima tahun sekali oleh dua per tiga dari anggota parlemen dan dewan setempat. Namun presiden tidak memiliki kekuasaan apapun, tapi dapat dilengserkan bila melakukan tindak korupsi ataupun tindakan lain merugikan negara. Pemimpin pemerintahan negara Vanuatu dijalankan oleh Perdana Menteri. Meski merupakan negara berkembang, negara Vanuatu mempunyai sistem politik yang cukup dewasa karena mendapat pengaruh dari sistem politik Inggris.

Walter Lini yang merupakan Perdana Menteri pertama Vanuatu menekankan pada prinsip Sosialisme Melanesia yang menjelaskan tentang komunalisme. Walter Lini merupakan perdana menteri yang berasal dari partai Vanuaaku Pati (VP), yang merupakan partai pemenang pemilihan umum nasional pada 1979, fokus terhadap isu – isu kemerdekaan dan yang memimpin New Hebrides selanjutnya, kelompok ini berusaha memulai suksesi terbuka. (Morgan, 121) VP memberi penekanan khusus terhadap nasionalisme, mempertahankan kultur tradisional, Kastom dan kedaulatan bangsa. (Morgan, 121) VP menganut paham Sosialisme Melanesia yang merupakan turunan dari Melanesian Way. VP yang menganut Sosialisme Melanesia mempunyai kebijakan luar negeri berdasarkan pada keanggotaannya dalam Gerakan Non

Blok, dan juga termasuk dalam advokasi atas dekolonialisasi atas koloni Melanesia tersisa (Papua dan Kaledonia Baru) serta penolakan atas aliansi Perang Dingin. (Morgan, 121) Fokus yang dibawa VP terhadap Vanuatu menjelaskan bahwa dalam pemerintahan ada penekanan khusus terhadap dekolonialisasi atas koloni Melanesia. Hal ini sejalan dengan prinsip Melanesia Way, Sosialisme Melanesia serta Melanesia Renaissance.

Sistem pemerintahan negara Vanuatu masih terhubung dengan kultur dan sejarah Melanesia dalam administrasinya. Politik tradisional Vanuatu terbentuk dari unit – unit dalam skala kecil terdiri atas lima puluh hingga tiga ratus orang. (Premdas 1987).

Sistem pemerintahan negara Vanuatu masih terhubung dengan kultur dan sejarah Melanesia dalam administrasinya. Politik tradisional Vanuatu terbentuk dari unit – unit dalam skala kecil terdiri atas lima puluh hingga tiga ratus orang,

terdesentralisasi dalam banyak otonomi, komunitas masyarakat demokratis yang mempraktikkan pengambilan keputusan secara kolektif melalui diskusi dan debat terpisah hingga mencapai konsensus (Premdas 1987).

Tujuan yang diharapkan dari Melanesia Renaissance dan Sosialisme Melanesia mengalami perubahan dalam praktik politik. Melanesian Renaissance bertujuan untuk menolak perubahan yang diberikan oleh kolonial Inggris dan Perancis demi mengembalikan nilai – nilai fundamental sosial asli dari Melanesia. Namun dalam praktiknya terjadi ketidaksetaraan yang tertutup oleh legitimasi kastom (tradisi). Dalam situasi kontemporer, dimana pengusaha pribumi mencari keuntungan pribadi atas kekayaan dan kekuatan. Praktik tersebut tidak dapat ditawar, tetap konsisten dilakukan sebagai kebiasaan tradisional dari pemimpin lokal. (Premdas 1987)

Untuk membantu menjelaskan domestik politik Vanuatu lebih mendalam, perlu dijelaskan mengenai

sistem integritas nasionalnya. Menurut Kelompok Penasehat Sistem Integritas Nasional Vanuatu, sistem integritas nasional didefinisikan sebagai sebuah sistem dimana semua institusi bekerja sama dan saling mendukung untuk memenuhi perannya secara efektif, efisien, serta akuntabilitas dan transparan. (Jowitt 2014) Sistem integritas nasional terbentuk melalui penilaian kuantitatif dari tiga dimensi yaitu kapasitas, pemerintahan, dan peran. Penilaian ini membantu dalam mempertegas kekuatan pilar pembentuk dari sistem integritas nasional. Pilar yang merupakan pondasi representasi profil suatu negara terbagi atas analisis pondasi institusi politik, pondasi sosial politik, pondasi ekonomi sosial, dan pondasi sosio kultural. (Jowitt 2014)

Negara ini mempunyai pondasi yang kuat sosiokulturalnya. Hak asasi manusia dilindungi oleh hukum dan sangat dihormati dalam praktek keseharian. Pemerintah membantu meyakinkan tatanan atas negara dan ekonomi tradisional yang dapat menyediakan kebutuhan masyarakat akan makanan, air, dan tempat tinggal. (Jowitt 2014) Namun tidak serta merta pondasi lainnya tidak penting dalam analisa domestik politik Vanuatu terutama sistem integritas nasionalnya. Keempat pondasi dari sistem integritas nasional Vanuatu penting untuk diketahui perannya dalam mendukung sistem integritas nasionalnya. Pondasi pertama dari sistem integritas nasional adalah pondasi politik. Kondisi politik Vanuatu cenderung terfragmentasi, dan sejak tahun 1991 tidak ada partai yang mampu mendapatkan kursi secara penuh di pemerintahan. Keadaan ini menghasilkan pemerintahan yang dijalankan secara koalisi. (Jowitt 2014) Kondisi ini menyebabkan instabilitas politik di Vanuatu. Instabilitas politik dimaksud adalah fragmentasi politik Vanuatu yang dipengaruhi oleh kultur tradisional dan otoritas model pimpinan tradisional. Sehingga perkembangan atas pengaruh tersebut berdampak pada pertukaran persepsi pada peran pemimpin politik dan proses demokrasi.

(Jowitt 2014) Kondisi yang demikian menyebabkan proses demokrasi terutama pembuatan kebijakan cenderung dinamis. Instabilitas terhadap Institusi politikal Vanuatu berdampak pada kontinuitas atas kebijakan dan kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan secara konsisten. (Jowitt 2014) Pondasi kedua adalah pondasi sosial. Penduduk Vanuatu terdiri dari 95% penduduk lokal yaitu ni-Vanuatu etnis Melanesia. Etnis Melanesia memiliki hubungan yang kuat antar sesama etnis. Hubungan kesamaan warna kulit sering disamakan dengan sistem wantok, terpusat pada kastom, dan merupakan dari kelompok politik yang cenderung kecil dan terlokalisasi. (Jowitt 2014) Maka tidak heran adanya hubungan antara politik dan komunitas tradisional. Hubungan antara politisi dan komunitas mengartikan pada sosial masyarakat, yang peka terhadap organisasi non pemerintahan (NGO), tetapi tidak memainkan peran mediasi antara sistem politik dengan sistem publik. (Jowitt 2014) Sosial masyarakat cenderung aktif terhadap perjuangan nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan kultur tradisional. Pada pondasi sosial, tahun 2012 dijelaskan mengenai amandemen atas Representation of the People Act tentang sentimen anti-Asia yang dianggap diskriminatif oleh Vanuatu dengan pernyataan berikut, keluarga yang sudah tinggal di Vanuatu untuk beberapa generasi belum tentu dianggap sebagai penduduk lokal, terutama jika mereka keturunan penduduk Asia. (Jowitt 2014) Pernyataan di atas menunjukkan adanya sentimen anti Asia. Ketegangan antara penduduk asing dan lokal merupakan perluasan isu pasca kolonial yang berkembang menyesuaikan kultur lokal terutama bila menyangkut masalah ancaman kepemilikan tanah. (Jowitt 2014) Pondasi sistem integritas nasional ketiga adalah pondasi ekonomi. Pondasi ekonomi menjelaskan bahwa mendapat sumber dana operasional negaranya dari bantuan luar negeri. Pada tahun 2010, bantuan luar negeri untuk pembangunan tercatat memenuhi 16% dari Pendapatan Domestik Bruto. (Jowitt 2014) Selain itu

Pemerintah Vanuatu mencari cara untuk menambah pendapatan negara dengan meningkatkan pajak dasar dan peningkatan sektor bisnis yang masih rapuh. Namun rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi pondasi ekonomi Vanuatu. Pondasi keempat dari sistem integritas nasional adalah pondasi kultural. Pada pondasi kultural ini Vanuatu memiliki kultur yang kuat dalam mempengaruhi pola pikir masyarakatnya. Menurut laporan studi dari Indikator Alternatif atas Kesejahteraan untuk Melanesia pada tahun 2012 Vanuatu menunjukkan bagaimana pentingnya nilai – nilai Melanesia berpengaruh terhadap masyarakat baik secara personal maupun dalam komunitas masyarakat. Pondasi kultural ini memiliki aspek lainnya dalam sistem integritas nasional yaitu rasa hormat. Rasa hormat terhadap pemimpin dan keluarga, sangat dekat terasosiasi dengan penerimaan tanpa bantahan. (Jowitt 2014) Artinya bahwa Vanuatu lebih memilih hidup dalam kondisi kemiskinan dan pemerintahan korup daripada menghadapi bahaya konfrontasi terhadap para penguasa. (Jowitt 2014)

Hal tersebut menunjukkan kontradiksi antara prinsip Sosialisme Melanesia dengan praktik politik yang dilakukan dimana tidak diterapkannya nilai – nilai komunalisme, saling berbagi, dan kemanusiaan. Sosialisme Melanesia hanya menjadi kewajiban tradisional dari pemimpin untuk layak dipilih dalam pemilihan. Dengan demikian domestik politik negara Vanuatu memang dipengaruhi oleh nilai – nilai Sosialisme Melanesia. Namun dalam praktiknya Sosialisme Melanesia ini hanya menjadi alasan politis bagi kelompok tertentu untuk kepentingan tersendiri.

Selain membahas sosiokultural dari Vanuatu penting diperhatikan pula kondisi politik dan ekonomi yang terjadi di Vanuatu. Kedua kondisi penting itu diperhatikan juga karena dari pola kebijakan yang dilakukan Vanuatu merupakan representasi dari kondisi

politik dan ekonomi yang terjadi di Vanuatu.

Pada aspek politik, Vanuatu merupakan negara yang memiliki tingkat instabilitas politik yang cukup tinggi. Dimana cukup banyak terjadi pergantian Perdana Menteri dari beberapa partai politik yang terdapat di Vanuatu. Secara konstitusi memiliki karakter yaitu koalisi pemerintahan dengan dukungan yang fluktuatif dan terpisah atas banyak partai politik. (The Commonwealth) Pemerintahan Vanuatu sering berganti Perdana Menteri akibat dari mosi tidak percaya yang dilakukan oleh parlemen Vanuatu. Isu kemerdekaan Papua pun menjadi komoditas politik bagi pencalonan Perdana Menteri Vanuatu demi mendulang suara pemilihan umum. Hal ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Sato Kilman atas instabilitas politik yang terjadi di Vanuatu serta sikap reaktif yang dilakukan oleh Vanuatu terhadap Indonesia khususnya dalam kasus kemerdekaan Papua.

Kemudian pada aspek ekonomi, Vanuatu menjalin kerjasama dengan negara – negara seperti China dan Australia. Dalam setiap upaya diplomatiknya Vanuatu memperjuangkan Papua, Vanuatu mendapatkan dukungan bantuan dana dari negara – negara tersebut. Selain itu pula, Indonesia yang sebagai negara tergugat oleh Vanuatu juga memberi bantuan terhadap Vanuatu terutama dalam masalah bencana alam Cyclone Pam yang terjadi di Vanuatu pada masa pemerintahan Sato Kilman. Dampak dari bantuan ekonomi itu terhadap Vanuatu adalah turunnya tingkat reaktif Vanuatu dalam melawan Indonesia khususnya mendukung kemerdekaan Papua. Terutama pada masa Sato Kilman, Vanuatu cenderung lunak dan mau menerima ide pembukaan kedutaan besar Indonesia di Vanuatu.

Penggunaan isu etnis secara konsisten digunakan Vanuatu di setiap Perdana Menteri dalam upaya diplomatik baik regional maupun

internasional. Bukti bahwa konsistensi isu etnis yang digunakan Vanuatu ketika pemerintahan Perdana Menteri Barak Sope mendukung gerakan Papua Merdeka. Vanuatu tidak mendukung secara diplomatik untuk kemerdekaan Papua, tetapi juga melakukan beberapa hal untuk memperkuat dukungannya. (Singh 2008) Salah satunya dengan menjadi tuan rumah aktifis gerakan kemerdekaan Papua, seperti John Ondawame dan Andy Ajamiseba, serta mendorong negara – negara Pasifik Selatan untuk mendukung atas kemerdekaan Papua. Vanuatu juga pernah menjadi tuan rumah West Papua People’s Representative Office di Port Villa sejak tahun 2003. (Singh 2008) Puncaknya adalah ketika Pemerintah Vanuatu menyampaikan sejumlah mosi parlemennya pada 5 Desember 2005, dimana parlemen Vanuatu memfasilitasi untuk kemerdekaan Papua, ada sepuluh mosi parlemen Vanuatu yang memfasilitasi kemerdekaan Papua

Upaya diplomatik yang dilakukan secara intensif oleh Vanuatu terwujud dari keaktifannya dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Papua di berbagai Forum Internasional. Dalam setiap upaya diplomatik yang dilakukan oleh Vanuatu terjadi dinamika dukungan, terutama strategi diplomatik yang dilakukan oleh Perdana Menteri Vanuatu. Pada level sub regional Melanesia, Vanuatu menyuarakan secara tegas dukungan kemerdekaan Papua melalui organisasi sub regional yaitu Melanesian Spearhead Group (MSG). Selain forum sub regional, Vanuatu juga menyuarakan dukungan melalui konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa. Namun di beberapa forum lainnya upaya diplomatik dari Vanuatu mengalami perubahan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai dinamika upaya diplomatik Vanuatu terhadap dukungan kemerdekaan Papua baik di regional maupun internasional.

Upaya diplomatik yang dilakukan secara intensif oleh Vanuatu terwujud dari keaktifannya dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Papua di berbagai Forum Internasional.

Moana Kalosil sangat vokal terhadap isu Papua. Dalam setiap pidatonya di forum internasional, Moana Kalosil memberi dukungan penuh terhadap Organisasi Papua Merdeka. Moana Kalosil menyatakan bahwa telah terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Ia menyatakan bahwa perlu ada akses dari organisasi Hak Asasi Manusia internasional untuk menginvestigasi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Selain itu Moana Kalosil juga mendorong organisasi West Papua National Coalition for Liberation diberikan keanggotaan penuh dalam organisasi sub regional Melanesian Spearhead Group. (ABC News 2014) Bahkan Moana Kalosil juga berusaha memboikot delegasi kunjungan yang dilakukan oleh menteri luar negeri dari Melanesian Spearhead Group apabila tidak diberi akses terhadap kelompok pro kemerdekaan Papua. (ABC News 2014) Selain memboikot delegasinya Perdana

Menteri Moana Kalosil berniat memutus hubungan kerja sama antara Vanuatu dengan Indonesia. Pemerintah Kalosil akan mengakhiri atau memutuskan perjanjian dengan Indonesia dimana Vanuatu menerima bantuan dari kepolisian dan Militer Indonesia. (Tabloid Jubi 2013) Joe Natuman juga menyatakan belasungkawa kepada tokoh perjuangan kemerdekaan Papua Dr.

John Ondawame yang meninggal pada September 2014 . Joe Natuman menyatakan bahwa Dr. John Ondawane merupakan pejuang kemerdekaan Papua yang telah gugur. Dr. John Ondawane menyatakan kepada Joe Natuman bahwa Vanuatu sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak atas penentuan nasib sendiri untuk masyarakat Papua. (Free West Papua Campaign 2014) Joe Natuman menyatakan bahwa Vanuatu sangat bersemangat untuk mengadvokasi untuk mencapai penentuan nasib sendiri dari masyarakat Papua dan sangat bersyukur atas

demonstrasi dukungan di Perserikatan Bangsa – Bangsa. Joe Natuman juga menyatakan bahwa setiap dukungan yang diberikan kepada Papua diperuntukan untuk memfasilitasi proses penentuan nasib sendiri dengan tahap diterimanya sebagai anggota Melanesian Spearhead Group. Joe Natuman juga menyampaikan bahwa Vanuatu masih mencari opini dari Pengadilan Internasional atas legalitas dari proses pemberian sanksi Persatuan Bangsa – Bangsa yang sebelumnya Guyana Baru Belanda lalu bergeser ke Indonesia. Sikap Sato Kilman yang mendukung Pemerintah Indonesia juga menunjukkan adanya kerjasama tersendiri antara Vanuatu dengan Indonesia. Vanuatu pada masa Sato Kilman menerima bantuan atas bencana Cyclone Pam dari Indonesia. (Pacific Media Center 2015) Selain itu Sato Kilman saat masih menjabat menjadi Menteri Luar Negeri Vanuatu pada masa Joe Natuman sering diundang dalam kunjungan diplomatik. Salah satunya adalah diundang pada pertemuan Bali Democracy Forum pada 10-11 Oktober 2014. Dalam pertemuan ini yang bertemakan *Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century*, Sato Kilman menyatakan akan membuka kantor Kedutaan Besar Vanuatu di Indonesia. Tujuannya mempererat hubungan diplomatik kedua negara. Selain itu Sato Kilman menganggap Indonesia sebagai partner penting dan strategis bagi Vanuatu karena keduanya berada di kawasan Asia – Pasifik.

Melanesian Spearhead Group merupakan organisasi sub regional Melanesia yang dibentuk pada 14 Maret 1988 di Port Villa, Vanuatu. Anggota yang tergabung dalam MSG adalah Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), dan gerakan pro kemerdekaan dari Kaledonia Baru. (Cain 2014) Melanesian Spearhead Group memiliki tugas dalam bidang perdagangan dan upaya

perdamaian di wilayah Melanesia. Terbentuknya organisasi ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang menyangkut regionalisme yang ada di kawasan Pasifik Selatan. Pertama adalah regionalisme di kawasan tersebut diwarnai oleh nuansa identitas dan rivalitas yang kuat, bahkan mendominasi hubungan intra sub-kawasan dengan menggunakan bentuk diplomasi yang bercirikan non-formal dan relatif egalitarian. (Wardhani 2015) Kedua, kerjasama regional yang dibangun melalui pendekatan non market-sharing, namun lebih didorong pada faktor ketersebaran geografis, keterpencilan, ketidakberdayaan ekonomi, dan kurangnya sumber daya. (Wardhani 2015) Ketiga, kerjasama regional yang dibangun untuk “amplifying their voices”. (Wardhani 2015) Hal ini merupakan akibat dari faktor pertama sehingga penggunaan organisasi regional di Pasifik Selatan cenderung digunakan untuk membantu mengartikulasikan kepentingan mereka secara kolektif untuk dapat diperhatikan di dunia internasional. Sebab kekuatan mereka secara berkelompok akan memberi kekuatan pada posisi tawar yang lebih kuat atas berbagai isu daripada mereka melakukannya secara individu. Keempat, regionalisme di Pasifik Selatan memberikan rasa sense of unity yang berdasarkan pada keterkaitan antara tradisi, kepentingan dan sudut pandang bersama. (Wardhani 2015) Melanesian Spearhead Group yang merupakan organisasi kawasan di Pasifik Selatan pun lahir dari faktor – faktor di atas. Maka ketika organisasi ini lahir empat faktor di atas nantinya mendorong elemen – elemen identitas menjadi dasar regionalisme di kawasan Melanesia. Elemen seperti “we feelings”, persamaan sejarah, dan kemiripan sistem nilai dan budaya, menjadi landasan kuat di regionalisme Melanesia. (Wardhani 2015) Elemen – elemen identitas ini tidak terlepas dari tokoh intelektual di wilayah tersebut seperti mendiang Bernard Narokobi, Jean Marie Tjibaou dan Walter Lini. Khusus untuk Walter Lini, beliau merupakan Perdana Menteri Vanuatu yang pertama memiliki gerakan

yang radikal di perpolitikan dunia. (Wardhani 2015) Vanuatu pun menjadi salah satu negara pemrakarsa terbentuknya Melanesian Spearhead Group. Vanuatu di dalam Melanesian Spearhead Group ini berperan sebagai tempat kantor sekretariat dan juga aktif mendorong masuknya gerakan pro kemerdekaan Papua untuk masuk dalam keanggotaan organisasi sub regional ini. Sikap luar negeri Vanuatu sering berseberangan dengan Pemerintah Indonesia, terutama bila menyangkut masalah Papua. Vanuatu secara terang – terangan menunjukkan sikap menolak setiap langkah yang diambil Indonesia ketika Indonesia mendapatkan simpati dari pihak lain. Sikap diametral ini seolah – olah menjadi platform yang diambil Vanuatu untuk setiap persoalan yang berkaitan dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). (Wardhani 2015) Indonesia dalam hal ini mempunyai rekam jejak yang kurang baik terhadap negara – negara di Pasifik Selatan. Indonesia yang mulai mendekati kawasan Pasifik Selatan mulai tahun 1980-an menghadapi persoalan utama pada image negatif negara – negara Pasifik Selatan yang melihat Indonesia sebagai negara ‘agresif’ karena peliknya persoalan nation building yang tidak terlepas dari masalah etnisitas di Indonesia, khususnya yang terjadi di Indonesia Timur. (Wardhani 2015) Negara – negara Pasifik Selatan cenderung tidak bersahabat dengan Indonesia pada masa kepemimpinan Suharto. Namun pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Indonesia melakukan pendekatan secara formal kelembagaan dengan membentuk Southwest Pacific Dialogue maupun secara informal dengan mengirimkan misi – misi budaya. (Wardhani 2015) Langkah besar dilakukan Indonesia ketika mendapatkan keanggotaan resmi dalam Melanesian Spearhead Group pada KTT di Honiara, Kepulauan Solomon pada 26 Juni 2015. Sedangkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) hanya mendapatkan status peninjau (observer). Dari peristiwa ini Vanuatu juga menyuarakan protesnya terhadap keanggotaan

Indonesia yang masuk dalam organisasi Melanesian Spearhead Group sebagai observer. Pernyataan Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil dalam seratus hari kerja pertama di pemerintahan Vanuatu secara tegas menyatakan bahwa Melanesia bukanlah untuk Indonesia. Pemerintah Vanuatu menyampaikan posisinya bahwa Melanesia hanya untuk Melanesia saja. (ABC News 2013) Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil menyatakan bahwa akan mendukung masuknya Papua dalam Melanesian Spearhead Group ketika para pemimpinnya hadir dalam pertemuan di Kaledonia Baru. Hal ini menunjukkan bahwa fokus dari Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil adalah pada proses kemerdekaan Papua dari Indonesia. Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil juga menyampaikan suaranya melalui pidatonya di Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa yang menyatakan adanya pelanggaran HAM berat di Papua sehingga menelan banyak korban jiwa. Namun pernyataan dari Perdana Menteri Vanuatu dibantah oleh Pemerintah Indonesia bahwa adanya kontradiksi dalam pernyataan Perdana Menteri negara Vanuatu yang menyatakan bahwa diterimanya kunjungan delegasi tertinggi dari masing – masing negara Melanesian Spearhead Group dan mendapat informasi dari Papua secara langsung. Konfrontasi dalam diplomasi terbuka ini menandakan bahwa diplomasi Indonesia atas Papua berhasil. Ketika seluruh elemen pemerintahan Vanuatu mendukung disertai rasa empati terhadap perjuangan Papua, tetapi sentimen akan dukungan terhadap Papua dirasa dangkal oleh negara Melanesia lainnya. (Elmslie, 101)

Melanesia Renaissance merupakan mimpi yang ingin digapai oleh negara – negara Melanesia. Mimpi dan aspirasi merupakan salah hal yang dicetuskan oleh para pendiri Melanesian Spearhead Group. (PacNews 2013) Walter Lini yang merupakan advokat dari Melanesia menyuarakan kemerdekaan dari kolonialisasi, lalu melakukan diskusi dengan Papua Nugini

dan Kepulauan Solomon pada awal 1980-an untuk bekerja bersama dengan nilai – nilai umum, prinsip dan ekspetasi untuk memperjuangkan identitas dan kemerdekaan. (PacNews 2013) Dari definisi tersebut maka kemerdekaan atas negara – negara Melanesia dan kerjasama menjadi fokus utama dari mimpi Melanesia Renaissance. Selain itu, kerjasama antara negara Melanesia membutuhkan penguatan akan kebebasan berpolitik dan kesejahteraan atas seluruh masyarakat Melanesia, sebagaimana yang ditekankan oleh para pendiri MSG, 25 tahun yang lalu. (PacNews 2013) Maka tidak heran bahwa kemerdekaan penuh atas wilayah Melanesia seperti Papua menjadi fokus utama menggapai Melanesia Renaissance. “Melanesia tidak merdeka sebelum semua Melanesia terbebaskan - merdeka dari jerat kolonialisme dan kemiskinan”. (PacNews 2013) Untuk mencapai Melanesia Renaissance maka Melanesian Spearhead Group memainkan posisi penting di Pacific Island Group. Melanesian Spearhead Group memainkan peran dengan membantu negara kepulauan kecil dengan memberi jawaban atas masalah pembangunan seperti peningkatan transportasi. (Cain 2015) Posisi penting merupakan bentuk upaya diplomatik untuk mendapat dukungan agar negara kecil tersebut mendapat kesejahteraan yang sama terutama yang memiliki kesamaan etnis Melanesia.

Keberadaan Vanuatu dalam Melanesian Renaissance menjadi sangat penting terutama karena pencetus dari ide dan mimpi ini merupakan Perdana Menteri pertama Vanuatu yaitu Walter Lini. Sejak awal merdeka hingga sekarang penyuaran kemerdekaan atas negara Melanesia menjadi sangat penting. Kemudian pada masa pemerintahan Perdana Menteri Sato Kilman, beliau menyatakan bahwa ide dari Melanesia Renaissance sekarang merupakan realisme praktis yang mungkin di luar apa yang telah diramalkan sebelumnya. (PacNews 2013) Sato Kilman pun menantang para pemimpin Melanesian Spearhead Group

lainnya untuk kemerdekaan masyarakat Kanak. Karena tanpa kemerdekaan, Melanesia tidak akan menikmati kehidupannya. (PacNews 2013) Dalam masalah Papua, Melanesia Renaissance menjadi pedoman Vanuatu dalam setiap dukungannya. Melanesia Renaissance yang mengandung nilai – nilai Melanesian Way yang dicetuskan oleh Walter Lini yang merupakan Perdana Menteri Vanuatu pertama. Vanuatu dalam mendukung Papua, menjadi ujung tombak di negara – negara Melanesia. Vanuatu yang baru merdeka pada 30 Juli 1980 termasuk salah satu negara yang mendorong solidaritas sesama Ujung Tombak Melanesia (Melanesian Spearhead Group) dimotori oleh mantan Perdana Menteri Vanuatu Walter Lini. Mantan Perdana Menteri Vanuatu inilah yang mensponsori berdirinya Ujung Tombak Melanesia (Melanesia Spearhead Group) pada Maret 1988 di Port Villa. (Tabloid Jubi 2013) Hal ini menunjukkan Vanuatu yang menjadi ujung tombak dari Melanesian Spearhead Group, dimana mempunyai peran yang besar dalam menegakkan Melanesian Way di kawasan Melanesia. Dukungan Vanuatu terhadap Papua yang didasarkan pada Melanesian Renaissance akan dapat mengulang proses kemerdekaan Papua Nugini. Saat itu Melanesian Way berkembang pesat awal 1970-an ketika Papua Nugini hendak merdeka dari penjajahan pemerintahan Australia, 16 September 1975. Saat itu muncul gerakan – gerakan radikal yang menentang kolonialisme dan menuntut kemerdekaan Papua Nugini. (Tabloid Jubi 2013) Ideologi kaum nasionalis Papua Nugini lebih tercermin pada istilah Melanesian Way. Hal inilah yang juga diterapkan pada kasus Papua dimana Vanuatu ingin menegakkan kembali budaya Melanesia melalui Melanesian Renaissance. Ini berarti bahwa Lini harus menunjuk pada kelahiran kembali identitas dan tujuan kita, serta memelihara, dan tanpa mencegah hak yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membangun dengan cara kita dan sesuai dengan nilai – nilai dan harapan – harapan kita. (Tabloid Jubi 2013)

Kesimpulan

Melalui penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh domestik politik dari Vanuatu sangat kuat dalam orientasi kebijakan luar negeri sehingga menghasilkan dukungan yang kuat terhadap kemerdekaan Papua. Semangat Melanesia Renaissance dengan mengangkat nilai – nilai Melanesian Way dibawa oleh Perdana Menteri pertama Vanuatu Walter Lini. Walter Lini mengangkat nilai – nilai Melanesian Way dalam pemahaman baru yaitu Sosialisme Melanesia. Sosialisme ini merupakan hasil kedekatan Vanuatu dengan negara – negara Sosialis seperti Uni Soviet. Sosialisme Melanesia menekankan pada kepedulian dan komunalisme yang

bersumber dari nilai lokal Wdalam Melanesian Way. Hal ini semakin dipertegas dengan kuatnya pondasi kultur dan sosial yang mendominasi dalam integritas Vanuatu. Dominasi ini yang menjadikan Vanuatu sangat menjunjung tinggi nilai – nilai Melanesia dalam setiap perilaku kebijakannya. Vanuatu dalam menyuarakan dukungan terhadap Papua selalu mengusulkan untuk memasukkan organisasi gerakan kemerdekaan Papua untuk masuk sebagai anggota penuh dalam organisasi sub regional Melanesian Spearhead Group. Namun negara anggota lainnya seperti Fiji dan Papua Nugini enggan untuk memasukkan organisasi gerakan Papua merdeka masuk kedalam Melanesian Spearhead Group.

Daftar Pustaka

- BUKU
- [1] Cain, Tess Newton. “The Renaissance of the Melanesian Spearhead Group”, in *New Pacific Diplomacy*, ed. Greg Fry and Sandra Tarte . Australia National University.2015.
 - [2] Elmslie, Jim. “Chapter 7 : Indonesia Diplomatic Manuevering in Melanesia : Challenges and Opportunities” in *Regionalism, Security and Cooperation in Oceania*. ed. Rouben Azizian and Carleton Cramer. the Daniel K. Inouye : Asia Pacific Center for Security Studies, Juni 2015.
 - [3] Jowitt, Anita. *National Integrity System Assessment : VANUATU 2014*. Transparency International Vanuatu. June 2014.
- JURNAL
- [4] Wardhani, Baiq L. S. W. “Quo Vadis Melanesian Spearhead Group.” *Jurnal Global dan Strategis*, Vol.9, No.2 (Juli 2015):190-206.
 - [5] Premdas, Ralph R. *Melanesia Socialism: Vanuatu’s Quest For Self-Definition and Problem of Implementation*. Pacific Studies : McGill University. 1987.
 - [6] Putnam, Robert D. *Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games*. International Organization: Vol 42, No.3 . Summer 1988
- KORAN ONLINE
- [7] “Democracy, Governance, Leaderboard, Pacific, Pacific Islands, Pacific Ocean, Papua, Vanuatu : The Leaderboard: Sato Kilman”, Center For Strategic & International Studies Asia Program, 17 Juni 2015, <http://cogitasia.com/the-leaderboard-sato-kilman-2/> (diakses pada 9 Maret 2016).
 - [8] Domingus Mampioer, “West Papua Ujian Bagi Negara – Negara Ujung Tombak Melanesia”, *TabloidJubi*, 15 Agustus 2013, <http://tabloidjubi.com/2013/08/15/west-papua-ujian-bagi-negara-negara-ujung-tombak-melanesia/>(diakses pada 2 Mei 2016).
 - [9] “Indonesia Serahkan Bantuan Kemanusiaan Senilai Rp 20 M untuk Vanuatu”, *Konsulat RI Darwin*, 6 April 2015, <http://www.kridarwin.org/album/video-gallery/574-indonesia-serahkan-bantuan-kemanusiaan-senilai-rp-20-m-untuk-vanuatu.html> (diakses pada 14 Maret 2016).
 - [10] Makareta Komai, “Dream of a Melanesian renaissance will continue for another 25 years, PM Kilman”, *PacNews*, 28 Januari 2013, <http://www.pina.com.fj/?p=pacnews&m=read&o=5520924065105e8c16a3e63869d324> (diakses pada 29 April 2016).
 - [11] “Prime Minister of Vanuatu pays tribute to West Papuan Leader at United Nations”, *Free West Papua Campaign*, 30 September 2014, <http://freewestpapua.org/2014/09/30/prime-minister-of-vanuatu-pays-tribute-to-west-papuan-leader-at-united-nations/> (diakses pada 9 Maret 2016).
 - [12] “Priority or Not, Indonesia Happy to Host Vanuatu Embassy”, *Jakarta Globe* , <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/priority-not-indonesia-happy-host-vanuatu-embassy/> (diakses pada 14 Maret 2016).
 - [13] Sally Andrews, “West Papua : Melanesian Spearhead Group has a tough decision to make”, *The Interpreter*, 3 April 2015, <http://www.lowyinterpreter.org/post/2015/04/03/west-papua-Melanesian-Spearhead->

- Group-tough-decision.aspx (diakses pada 14 Maret 2016).
- [14] Sear Dorney, "New Vanuatu PM looks to shake up foreign relation", ABC News, 17 Mei 2013, <http://www.abc.net.au/news/2013-05-17/an-new-vanuatu-pm-looks-to-shake-up-foreign-relations/4695650> (diakses pada 26 Februari 2016).
- [15] Siti Nuraisyah Dewi dan Nila Chrisna Yulika, "Republik Vanuatu Ketagihan Bali Democracy Forum", Vivanews. 11 Oktober 2014, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/547065-republik-vanuatu-ketagihan-bali-democracy-forum> (diakses pada 9 Maret 2016).
- [16] "Vanuatu defends boycott of Melanesian Spearhead Group delegation to Indonesia's Papua province", News ABC, 16 Januari 2014, <http://www.abc.net.au/news/2014-01-16/an-vanuatu-defends-msg-papua-visit-boycott/5203678> (diakses pada 18 Desember 2015).
- [17] "Vanuatu PM speaks out for West Papua at UN again", Free West Papua, 4 Maret 2014, <http://freewestpapua.org/2014/03/04/vanuatu-pm-speaks-out-for-west-papua-at-un-again/> (diakses pada 18 Desember 2015)
- [18] "Vanuatu PM Hopes MSG Can Facilitate West Papua/Indonesia Dialogue", Pacific Island Report, 3 Juli 2014, <http://pidp.org/pireport/2014/July/07-04-07.htm> (diakses pada 1 Maret 2016).
- [19] "Vanuatu Pushes UN to Investigate Allegations of Right Abuses in Papua", ABC News, 5 Maret 2014, <http://www.abc.net.au/news/2014-03-05/vanautu-urges-human-rights-investigation/5301270> (diakses pada 9 Maret 2016.)
- [20] "Vanuatu says Indonesia aid has no bearing on Papua Issue", RadioNZ, 9 April 2015, <http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/270765/vanuatu-says-indonesian-aid-has-no-bearing-on-papua-issue> (diakses pada 13 Maret 2016).
- [21] "VANUATU : Indonesian cyclone aid has 'no bearing' on Papua Issues, says Kilman", Pacific Media Centre, 15 April 2015, <http://www.pmc.aut.ac.nz/pacific-media-watch/vanuatu-indonesian-cyclone-aid-has-no-bearing-papua-issue-says-kilman-9213> (diakses pada 9 Maret 2016).
- [22] Victor Mambor, "Dukung Papua Masuk MSG, Vanuatu Akan Putuskan Perjanjian Kerjasama Dengan Indonesia", Tabloid Jubi, 8 Mei 2013, <http://tabloidjubi.com/2013/05/08/dukung-papua-masuk-msg-vanuatu-akan-putuskan-perjanjian-kerjasama-dengan-indonesia/> (diakses pada 14 Maret 2016).